ABSTRAK

Implementasi kebijakan Sasaran Kerja Pegawai Diduga belum optimal dikarenakan masih ada hambatan-hambatan yang terjadi. Implementasi kebijakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di BKPSDM Kota Padang Provinsi Sumatera Barat menjadi topik judul ini karena dianggap penting dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. Maka penulis tertarik memilih judul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**“. Dibawah bimbingan **Prof. Dr. Dra. Hj. Erliana Hasan, M.**Si dan **Dr. H. Burhanuddin, MS .**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendekripsikan bagaimana implementasi kebijakan Sasaran Kerja Pegawai. penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn dan payung hukum yang digunakan yaitu Peraturan Walikota Padang Nomor 61 tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu data yang di dapat bedasarkan fakta- fakta, kejadian atau fenomena yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, mengadakan wawancara dengan pegawai negeri sipil untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan memberikan pedoman wawancara, serta mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen, dokumentasi dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sasaran Kerja Pegawai dalam meningkatkan kinerja belum terimplementasi secara optimal, masih adanya faktor-faktor penghambat yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan diberlakukannya kebijakan Sasaran Kerja Pegawai diharapkan pemerintah atau instansi terkait dapat memberikan kontribusi yang positif guna meningkatkan kualitas SDM serta kinerja yang semakin baik.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sasaran Kerja Pegawai Pegawai Negeri Sipil**

***ABSTRACT***

*Implementation of policy Employee Target Targets Allegedly not optimal because there are still obstacles that occur. The implementation of the policy of the Employee Work Objective (SKP) in BKPSDM Kota Padang, West Sumatera Province becomes the topic of this title because it is considered important in improving the performance of civil servants. So the authors are interested in choosing the title "IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT EMPLOYMENT POLICY (SKP) IN IMPROVING PERFORMANCE IN THE SUPERVISORY AGENCY AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (BKPSDM) CITY PADANG WEST SUMATERA PROVINCE". Under the guidance of Prof. Dr. Dra. Hj. Erliana Hasan, M.Si and Dr. H. Burhanuddin, MS*

*This study aims to analyze and declare how the implementation of Employee Objectives policy. This research uses the implementation theory proposed by Van Meter and Horn and the legal umbrella used is the Mayor of Padang Regulation No. 61 of 2016.*

*This research uses descriptive method with inductive approach, that is data which can based on facts, events or phenomenon that exist in the field. Data collection techniques using observation, ie collecting data by way of direct observation of the object under study, conducting interviews with civil servants to obtain as much information as possible by providing interview guidelines, and collect data through books, documents, documentation and regulations legislation closely related to this research.*

*Based on the results of research and discussion it can be concluded that the Implementation of Employee Target Policy in improving the performance has not been implemented optimally, there are still inhibiting factors that become problems in this study.*

*With the enactment of Employee Task policy is expected government or related agencies can provide a positive contribution to improve the quality of human resources and better performance.*

**Keywords*:*  *Policy Implementation, Employee Work Objectives, Civil Servants***